

ASTA CITA ATAU ASTA CERITA?

Satu Tahun Menjual Mimpi berujung Tragedi

Intisari

Tulisan ini mempertanyakan secara kritis apakah Asta Cita benar-benar dijalankan sebagai arah kebijakan negara atau sekadar menjadi retorika politik. Melalui analisis terhadap implementasi Asta Cita 1 (penguatan demokrasi dan HAM) serta Asta Cita 7 (reformasi politik, hukum, dan birokrasi), kajian ini menemukan adanya jurang lebar antara komitmen normatif dan praktik di lapangan. Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran diwarnai oleh penyempitan ruang sipil, meningkatnya praktik represif aparat, serta penggunaan regulasi seperti UU ITE dan KUHP Baru yang membuka ruang kriminalisasi terhadap kritik. Di sektor agraria dan lingkungan, percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) berlangsung bersamaan dengan konflik tanah, deforestasi, dan bencana ekologis yang mengancam hak hidup masyarakat. Sementara itu, dalam tata kelola layanan publik, lemahnya pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan rapuhnya sistem digital negara menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum menyentuh problem struktural. Temuan ini menunjukkan bahwa problem utamanya bukan pada kekurangan visi, melainkan pada ketidaksungguhan dalam menjalankan mandat konstitusi. Negara belum konsisten menunaikan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia secara utuh. Reformasi yang dijanjikan cenderung berhenti pada perbaikan prosedural dan simbolik, tanpa menyentuh struktur kekuasaan yang melahirkan persoalan berulang. Jika kondisi ini terus dipertahankan, Asta Cita tidak akan menjadi arah perubahan, melainkan sekadar instrumen legitimasi yang menormalisasi penyempitan ruang sipil, perampasan ruang hidup, dan melemahnya fungsi institusi negara.

Kata Kunci: Asta Cita; Hak Asasi Manusia; Represi; Reformasi Birokrasi; Konflik Agraria; Disfungsi Negara.

1. PENDAHULUAN

1.1. Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia harus dipahami sebagai mandat, bukan hadiah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia

adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Definisi ini menempatkan HAM sebagai hak yang melekat sejak manusia ada, bukan pemberian negara atau hasil kemurahan kekuasaan. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah hanya bertindak sebagai pemegang mandat kemanusiaan dengan kewajiban mengikat untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak warga negara serta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil. Ketika kewajiban ini diabaikan, HAM direduksi menjadi jargon politik, sementara pelanggaran atas raga dan suara warga menjadi bukti pengkhianatan terhadap mandat kemanusiaan. Dalam konteks tersebut, Asta Cita berisiko berubah menjadi Asta Cerita, ketika janji kesejahteraan dan keadilan justru berujung pada tragedi yang harus ditanggung rakyat.

1.2. Instrumen Hukum Internasional

Standar martabat manusia dalam hukum internasional menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Prinsip ini ditegaskan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR/DUHAM) 1948 yang dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB. Dalam deklarasi tersebut terdapat 30 pasal yang bertujuan untuk melindungi setiap individu di seluruh negara atas hak asasi manusianya. Sebut saja Hak atas hidup, keamanan dan kebebasan, Hak atas kesetaraan di mata hukum, Hak akses terhadap hukum, Hak mendapat pendampingan hukum, Berpartisipasi dalam demokrasi, Kebebasan berekspresi, dan HAM untuk semua.

Lebih lanjut, komitmen tersebut diperkuat melalui International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang secara tegas menjamin hak atas hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, serta perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang. Di sisi lain, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) juga memastikan pemenuhan atas hak-hak dasar seperti hak atas kesehatan, termasuk akses terhadap pangan yang layak, serta hak atas pendidikan yang bermutu. Hukum internasional menjadi landasan yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban negara serta mendorong lahirnya kebijakan yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia secara menyeluruh.

1.3. Instrumen Hukum Nasional

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kerangka normatif yang jelas dalam menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara. Instrumen hukum dibuat bukan sekadar deretan pasal, namun batasan bagi kekuasaan agar tidak berjalan sewenang-wenang. UUD 1945, khususnya Pasal 28A–28J, menegaskan jaminan atas hak untuk hidup, hak atas rasa aman, kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak memperoleh pendidikan dan perlindungan yang setara di hadapan hukum.

Kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memperinci bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan menegaskan bahwa negara dapat dianggap melanggar bukan hanya melalui tindakan represif secara langsung, tetapi juga melalui pengabaian atau pembiaran terhadap hak-hak warga yang terancam. Lebih lanjut, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Indonesia secara resmi mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang berarti standar perlindungan HAM di tingkat nasional harus selaras dengan prinsip dan komitmen internasional yang telah disepakati.

1.4. Janji Politik: Bedah Asta Cita 1 dan 7

Pada dokumen visi-misinya, Prabowo–Gibran menyatakan komitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi negara melalui penguatan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Komitmen ini dirumuskan dalam Asta Cita 1, yang mencakup tiga ranah utama: penguatan ideologi Pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan HAM.

Pada aspek penguatan ideologi, ditegaskan upaya untuk memperkuat wawasan Pancasila di kalangan penyelenggara negara, mengembangkan praktik pembelajaran multikulturalisme sebagai refleksi masyarakat plural, serta membangun ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila semakin relevan bagi generasi muda, termasuk milenial dan Gen Z.

Dalam demokrasi, terdapat komitmen untuk mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas, menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik, serta menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum. Sementara dalam ranah HAM, pemerintah menyatakan akan melindungi hak

seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai ketentuan hukum, memastikan kebijakan yang humanis dan inklusif, memperkuat perlindungan perempuan dan anak, menjamin pemenuhan hak dasar kelompok rentan dan marjinal, serta memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia di dalam maupun luar negeri.

Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui Asta Cita 7 yang menjanjikan upaya untuk “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.” Pemerintah menargetkan terwujudnya “birokrasi yang bersih, melayani, dan profesional” serta “menjamin kepastian hukum dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum.

Jika dibaca secara konseptual, Asta Cita 1 dapat dipahami sebagai arah nilai yang hendak dituju, sementara Asta Cita 7 berfungsi sebagai mekanisme untuk mencapainya. Artinya, keberhasilan memperkuat demokrasi dan HAM sangat bergantung pada sejauh mana reformasi hukum dan birokrasi benar-benar dijalankan secara konsisten.

1.5. Masalah Utama: Asta Cita atau Asta Cerita?

Namun, melihat kondisi lapangan saat ini, muncul pertanyaan kritis: apakah yang disampaikan sebagai *cita* benar-benar terwujud dalam kebijakan dan praktik nyata, atau justru lebih menyerupai sekadar *cerita* dalam retorika pidato saja. Setidaknya dalam 1 tahun kepemimpinan Prabowo terdapat banyak hal yang masih perlu di evaluasi. Sebut saja penangkapan aktivis, Isu keracunan MBG, hingga bencana yang menimpa Pulau Sumatera bagian utara. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya istilah Asta Cerita, sebagai bentuk kritik terhadap jarak antara harapan besar yang disampaikan dan kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam situasi ini, Asta Cita yang seharusnya menjadi pedoman pembangunan justru dianggap sebagai tameng saat pemerintah dikritik. Alih- alih menjadi alat untuk evaluasi, Asta Cita sering terdengar seperti slogan pembelaan. Padahal, seharusnya Asta Cita menjadi dasar untuk memperbaiki kesalahan dan memperkuat tanggung jawab kepada publik bukan untuk menghindari kritik.

2. REPRESI DAN PEMBUNGKAMAN HAK SIPIL

2.1. Janji Demokrasi vs Realita Represi

Kalau kita membedah dokumen visi-misi Kabinet Gemuk ini, janji untuk memperkokoh demokrasi dan HAM melalui Asta Cita 1 terlihat sangat menjanjikan di atas kertas. Namun, setelah satu tahun lebih berjalan, narasi tersebut justru terasa seperti ada *gap* yang sangat lebar antara perlindungan dengan pendisiplinan yang dilakukan para aparat di lapangan. Seharusnya, Asta Cita 7 hadir untuk memperbaiki sistem agar lebih pro-rakyat. Namun, realitanya kita justru sering kali digunakan untuk membungkam suara-suara rakyat kecil.

Fenomena penyempitan ruang sipil ini membuktikan bahwa negara sedang mengalami *insecure*. Ketika kritik dari mahasiswa dan elemen masyarakat sipil tidak lagi dijawab dengan argumen, melainkan dengan gas air mata dan penangkapan sewenang-wenang, maka Asta Cita telah resmi berubah menjadi Asta Cerita.

2.2. Catatan Hitam Pelanggaran HAM Tahun 2025.

Data yang dirilis KontraS pada tanggal 9 Desember 2025 menunjukkan bahwa satu tahun terakhir bukanlah masa perbaikan, melainkan kemunduran HAM yang sangat serius. Berikut adalah fakta kuantitatif yang mengonfirmasi bahwa negara sedang tidak baik-baik saja:

Tabel 1.1. Rekapitulasi Peristiwa dan Korban Pelanggaran HAM di Indonesia Tahun 2025

Kategori Pelanggaran	Jumlah Peristiwa / Korban	Aktor Dominan
Pelanggaran Kebebasan Sipil	205 Peristiwa / 5.101 Korban	Polri (178), Pemerintah (14), TNI (5)
Penangkapan Sewenang-wenang	4.291 Korban	Polri
Penyiksaan (<i>Torture</i>)	71 Peristiwa / 159 Korban (17 Meninggal)	Polri (53), TNI (13), Sipir (5)
Pembunuhan di Luar Hukum	2 Peristiwa / 44 Korban Meninggal	Polri (26), TNI (15)
Kebebasan Beragama (KBB)	32 Peristiwa (Pelarangan Ibadah, Perusakan)	Massa/Kelompok Tertentu & Pemda
Penghilangan Paksa	34 Terkonfirmasi (Demo	Aparat Penegak Hukum

	Agustus 2025)	
--	---------------	--

Sumber: *Catatan Hari HAM KontraS 2025: Katastrofe Hak Asasi Manusia (Data diolah kembali oleh Tim Riset Kastrat FISIP UNY).*

Data di atas menunjukkan sebuah anomali dalam penegakan hukum kita. Dominasi Polri dalam hampir seluruh lini pelanggaran, mulai dari penangkapan sewenang-wenang hingga penyiksaan, menandakan bahwa reformasi birokrasi keamanan yang dijanjikan dalam Asta Cita 7 telah gagal!

Angka 4.291 penangkapan sewenang-wenang bukan sekadar angka, namun itu adalah jumlah orang yang dirampas kemerdekaannya tanpa prosedur yang jelas, termasuk pola-pola pembungkaman terhadap aktivis dan mahasiswa yang kian masif. Ketika penyiksaan masih menjadi metode yang lazim digunakan oleh aparat, maka klaim pemerintah soal memperkokoh HAM" adalah omon-omon.

2.3. Senjata Pembungkam: UU ITE dan KUHP Baru

Angka pelanggaran HAM yang dibahas sebelumnya tentu tidak muncul begitu saja. Ada perangkat hukum yang dalam praktiknya sering dipakai untuk membatasi ruang kritik. Di tengah janji reformasi hukum dalam Asta Cita 7, muncul pertanyaan: mengapa sebagian regulasi justru terasa makin membatasi ekspresi publik?

Salah satu regulasi yang sering disorot adalah UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024) sebagai revisi kedua. Pasal 27A, misalnya, mengatur larangan menyerang kehormatan atau nama baik melalui media elektronik. Pasal 28 ayat (2) melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berbasis SARA, sementara Pasal 45A dan Pasal 263 KUHP Baru juga mengatur soal penyebaran berita bohong yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Secara normatif, ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban publik. Namun dalam praktiknya, frasa seperti “menyerang kehormatan”, “kebencian”, atau “menyesatkan” kerap menjadi multitafsir.

Hal serupa terlihat dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Pasal 218 mengatur penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pasal 240 mengenai penghinaan terhadap lembaga negara, serta Pasal 256 tentang pembatasan demonstrasi tanpa pemberitahuan.

Pasal-pasal ini kembali menempatkan ekspresi kritik dalam ruang yang rentan dikriminalisasi apabila dianggap melewati batas yang ditafsirkan aparat penegak hukum.

Keberadaan pasal-pasal yang sudah disebutkan ini berpotensi menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Negara tidak perlu selalu menghadirkan represi fisik secara terbuka; ancaman pidana dan proses hukum yang panjang sudah cukup. Dalam situasi demikian, warga cenderung memilih sikap hati-hati yang berlebihan, membatasi kritik, atau bahkan diam demi menghindari risiko hukum.

2.4. Kesimpulan: Demokrasi dalam Bayang-Bayang Ketakutan

Kalau kita rangkai semua temuan di atas, ada satu hal yang jelas yakni jarak yang terlalu jauh antara janji dan kenyataan. Demokrasi dijanjikan akan diperkuat, HAM katanya jadi prioritas. Tapi data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) justru menunjukkan ruang sipil menyempit, aparat semakin dominan, dan kritik makin sering dianggap ancaman. Ribuan orang ditangkap tanpa prosedur yang jelas. Penyiksaan masih terjadi. Demonstrasi dibubarkan. Aktivis diproses hukum. Ini bukan sekadar deretan angka, tapi gambaran bahwa negara sedang terlalu mudah menggunakan kekuasaan untuk mengontrol, bukan melindungi.

Di saat yang sama, pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali dijadikan senjata pembungkaman. Orang jadi takut bicara. Mahasiswa jadi pikir dua kali untuk kritik. Masyarakat jadi memilih diam agar aman. Pada akhirnya, persoalannya bukan hanya soal pelanggaran HAM, tapi soal arah demokrasi kita ke depan: mau diperbaiki secara serius, atau terus dibiarkan berjalan dalam bayang-bayang ketakutan.

3. KRISIS RUANG HIDUP

3.1. Narasi Pembangunan vs Realita Perampasan

Asta Cita 1 yang menjanjikan penguatan demokrasi, HAM, Keadilan Sosial sering kali terbentur oleh praktik birokrasi yang semrawut. Janji ini berbenturan dengan praktik birokrasi pada Asta Cita 7 yang justru mendewakan efisiensi perizinan demi investasi. Praktik ini selalu dijalankan untuk mempermudah izin tambang dan perkebunan, sementara pengakuan terhadap

hak ulayat dan masyarakat adat dibiarkan berlapis-lapis dalam kerumitan prosedur yang tak kunjung usai. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang seharusnya menciptakan *good governance*, malah menciptakan praktik busuk.

Alih-alih membangun "kemandirian bangsa" sebagaimana didengungkan dalam Asta Cita, negara sejatinya sedang melakukan lelang ruang hidup rakyat kepada para pemodal secara sistematis. Di bawah kedok Asta Cita, istilah "kemandirian ekonomi" dan "hilirisasi" menjadi omongan manis untuk menormalisasi perampasan lahan, di mana hak masyarakat adat didefinisikan secara sepihak sebagai "penghambat investasi" yang harus disingkirkan demi pertumbuhan angka statistik. Akibatnya, ruang hidup yang seharusnya menjadi tempat berkembangnya budaya dan kedaulatan rakyat kini berubah menjadi "ruang amuk" karena masyarakat dipaksa melawan tembok birokrasi yang lebih tunduk pada perintah pasar daripada perintah konstitusi.

3.2. PSN dan Komodifikasi Lahan

Salah satu program dari pemerintahan Prabowo yaitu 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat. Wilayah yang paling disorot adalah Papua. Sebagaimana dilaporkan oleh Annisa tahun 2026 di Tempo, LBH Merauke menemukan bahwa pelaksanaan PSN Merauke berlangsung tanpa konsultasi bermakna atau *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang seharusnya dilakukan pemerintah dan perusahaan kepada masyarakat adat terdampak. Pelaksanaan PSN Merauke yang telah berjalan lebih dari satu tahun dinilai menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat adat Malind. Dampaknya meliputi konflik antar masyarakat adat, praktik pemaksaan, penghancuran dan hilangnya sumber pangan, kerusakan lingkungan, serta hilangnya hutan dengan ekosistem penting.

Tak hanya itu, Deforestasi akibat pengalihan lahan dengan program pangan dari pemerintah tanpa adanya pengawasan ketat dan perlindungan hak adat telah menjadi motor utama kerusakan ekologis di seluruh Indonesia. Kondisi ini berdampak pada hilangnya tutupan hutan primer yang tidak hanya memicu pelepasan emisi karbon masif dari lahan gambut yang dapat memperburuk krisis iklim, tetapi juga memutus ruang hidup satwa endemik hingga ke ambang kepunahan. Berdasarkan laporan *Global Forest Watch* dan investigasi *The Gecko Project*, lemahnya tata kelola ini sering kali berkelindan dengan praktik korupsi perizinan yang

memicu konflik agraria berkepanjangan, di mana masyarakat adat kehilangan kedaulatan atas tanah leluhurnya demi ekspansi monokultur. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan pengakuan hak adat yang absolut, kerusakan ekologis ini akan menjadi warisan krisis permanen yang mengancam ketahanan pangan dan bencana hidrometeorologi di masa depan.

3.3. Bencana Struktural dan Kelalaian Negara

Birokrasi yang buruk tersebut berdampak pada terjadinya tragedi kemanusiaan di penghujung tahun 2025. Melansir dari Beritasatu.com, BNPB melaporkan 1.135 orang menjadi korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa wilayah Sumatera, mulai dari wilayah Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatra Barat.

Melihat dari jumlah korban jiwa dari bencana tersebut, ini bukan lagi sekadar statistik bencana alam, melainkan sebuah bentuk Pelanggaran HAM Struktural atau "pembunuhan massal" yang dipicu oleh pengabaian fungsi dari pengawasan pada dampak terhadap lingkungan serta obral izin pembukaan hutan yang serampangan. Terlihat jelas bahwa birokrasi telah gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung ekologis dan mengakibatkan hilangnya Hak atas hidup bagi ribuan masyarakat seperti yang tercantum pada UUD 1945 Pasal 28A.

3.4. Marginalisasi dan Insekuritas Hak Masyarakat Adat

Pengabaian hak eksistensial masyarakat adat terlihat ketika negara menetapkan kawasan hutan tanpa mengakui keberadaan dan hak ulayat yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, negara memiliki kewenangan besar untuk menentukan status kawasan hutan, yang dalam praktiknya sering kali memasukkan wilayah adat sebagai hutan negara. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber ekonomi seperti hasil hutan, lahan pertanian, dan sumber daya alam lainnya. Lebih dari itu, mereka juga kehilangan bagian dari identitas budaya karena hutan bukan sekadar sumber penghidupan, tetapi juga ruang spiritual dan sosial yang membentuk jati diri komunitas adat.

Dari sisi hukum, kondisi ini menunjukkan belum adanya perlindungan yang kuat dan menyeluruh bagi masyarakat adat. Walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, pelaksanaannya

masih terbatas dan belum merata. Hingga kini, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat belum disahkan, sehingga pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat masih bersifat parsial. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa negara belum sepenuhnya berkomitmen memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang nyata bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat.

3.5. Kesimpulan: Pertumbuhan Ekonomi di Atas Kerusakan Ruang Hidup

Jelas bahwa narasi pembangunan yang dibungkus dalam janji demokrasi, keadilan sosial, dan swasembada justru berujung pada praktik perampasan ruang hidup, konflik agraria, kerusakan ekologis, hingga bencana kemanusiaan yang merenggut ribuan nyawa. Ketimpangan antara kemudahan izin investasi dan berbelitnya pengakuan hak ulayat, maraknya Proyek Strategis Nasional tanpa persetujuan bebas dan bermakna, serta lemahnya pengawasan lingkungan menunjukkan bahwa orientasi kebijakan lebih berpihak pada percepatan pertumbuhan ekonomi daripada perlindungan hak konstitusional rakyat, termasuk hak atas hidup dan hak masyarakat adat. Dalam pusaran kebijakan yang mengutamakan angka statistik dan hilirisasi, negara tampak lebih mencintai grafik pertumbuhan daripada nyawa rakyat di pelosok negeri yang dapat diartikan bahwa *“Mimpi swasembada yang dijual, berujung tragedi perampasan yang kekal.”*

4. TATA KELOLA BIROKRASI DAN DISFUNGSI LAYANAN PUBLIK

4.1. Mandat yang Dikhianati

Reformasi birokrasi dalam Asta Cita 7 dijanjikan sebagai langkah pembenahan politik dan hukum. Namun dalam praktiknya, perubahan itu belum terasa merata. Di banyak sektor, birokrasi masih berjalan lambat, prosedurnya berbelit, dan respon terhadap kritik sering defensif. Ada jarak antara narasi pembaruan dan pengalaman warga sehari-hari. Pelayanan publik seharusnya memudahkan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Hubungan antara pejabat dan kepentingan tertentu juga belum sepenuhnya transparan, sehingga publik sulit percaya bahwa sistem benar-benar bekerja untuk mereka.

Transformasi digital yang sering diklaim sebagai bukti kemajuan pun belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar. Aplikasi dibuat, sistem diperbarui, tetapi cara kerja dan pola

pikirnya belum banyak berubah. Modernisasi tampak di permukaan, sementara masalah lama masih bertahan. Jika kondisi ini tidak dibenahi secara serius, reformasi birokrasi hanya akan berhenti sebagai wacana. Perubahan yang dibutuhkan bukan sekadar tampilan baru, tetapi perbaikan cara kerja dan keberanian untuk membuka ruang akuntabilitas.

4.2. No Viral No Justice

Degradasi fungsi birokrasi mencapai titik paling rapuh pada institusi keamanan yang seharusnya menjadi pelindung utama keselamatan warga, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 28I Ayat (4). Fenomena “No Viral No Justice” mencerminkan secara terang bahwa sistem penegakan hukum telah mengalami krisis integritas, di mana keadilan tidak lagi bekerja melalui prosedur yang tetap dan berkelanjutan, melainkan baru bergerak ketika ditekan oleh sorotan publik di ruang digital. Data Ombudsman RI (2025) menunjukkan bahwa sepanjang periode 2021–2025, terdapat 3.308 laporan masyarakat yang mengeluhkan layanan kepolisian. Angka ini secara konsisten menempatkan Polri dalam tiga besar instansi yang paling banyak dilaporkan, terutama terkait proses penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka..

Konsistensi angka ini menunjukkan bahwa persoalannya tidak bisa lagi disederhanakan sebagai tindakan “oknum”. Krisis ini ditegaskan oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, yang menyatakan bahwa tingginya angka pengaduan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan indikasi adanya kebobrokan di level struktur. Najih menegaskan:

“Laporan yang tinggi menunjukkan adanya persoalan sistemik yang harus dilihat dari berbagai perspektif hukum, pemerintahan, HAM, dan manajemen publik.”

(Harahap, 2025)

Kondisi ini bisa dibaca melalui pemikiran Hadiz dan Robison (2013) yang menilai bahwa perubahan demokrasi di Indonesia tidak otomatis mengubah struktur kekuasaan yang sudah lama terbentuk. Secara prosedural kita memang mengalami reformasi, tetapi dalam praktiknya, akses terhadap jabatan dan sumber daya ekonomi sering kali tetap berputar di lingkaran yang relatif sama.

Dalam situasi seperti ini, institusi keamanan tidak sepenuhnya berdiri di ruang yang netral. Ia beroperasi dalam jejaring kepentingan politik dan ekonomi yang lebih luas. Akibatnya,

fungsi sebagai pelindung masyarakat bisa bergeser menjadi penjaga stabilitas yang menguntungkan kelompok tertentu. Pergeseran ini tidak selalu terlihat secara terbuka, tetapi dapat dibaca dari pola penegakan hukum yang tidak konsisten.

Di titik inilah jarak antara janji profesionalitas dalam Asta Cita 7 dan realitas lapangan menjadi terasa. Ketika sistem tidak bekerja secara otomatis dan adil, kepercayaan publik ikut terkikis. Keadilan yang seharusnya menjadi hak setiap warga terkadang terasa seperti sesuatu yang baru bergerak setelah ada tekanan atau sorotan luas. Jika kondisi ini terus berulang, maka krisis kepercayaan terhadap institusi keamanan akan semakin dalam.

4.3. Program MBG dan Problematika Pengawasan

Persoalan pengawasan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperlihatkan celah serius dalam tata kelola layanan publik. Lembaga seperti BPOM dan Dinas Kesehatan secara normatif memiliki mandat untuk memastikan standar keamanan pangan berjalan konsisten, terlebih dalam program berskala nasional yang menysasar anak-anak. Namun, data yang dihimpun oleh Shabrina melalui Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat bahwa sejak 2025 hingga awal 2026 terdapat 21.254 anak yang mengalami keracunan dalam pelaksanaan MBG. Angka ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian mutu belum bekerja secara optimal.

Memasuki tahun 2026, pemerintah menetapkan target *zero defect* atau nol insiden keracunan, yang diperkuat melalui Instruksi Presiden tentang Percepatan MBG serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG tertanggal 27 Oktober 2025. Secara normatif, kebijakan ini menunjukkan adanya komitmen perbaikan. Namun komitmen administratif tidak serta-merta menjamin efektivitas implementasi apabila tidak diikuti sistem pengawasan yang ketat dan konsisten.

Dalam praktiknya, mekanisme *quality control* serta pengawasan terhadap vendor pengadaan masih menghadapi berbagai kendala. Ketika distribusi program dan serapan anggaran lebih ditekankan dibanding pengujian keamanan pangan, risiko terhadap kesehatan anak-anak meningkat. Situasi ini mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan negara dalam memastikan bahwa pihak ketiga yang terlibat tetap memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam General Comment No. 12 (1999) tentang Hak atas Pangan, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan yang aman dan layak. Dalam konteks ini, kewajiban untuk melindungi (*to protect*) berarti memastikan vendor pengadaan, tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat. Jika pengawasan terhadap standar keamanan pangan tidak dijalankan secara konsisten, maka persoalannya tidak lagi sebatas kelalaian teknis, melainkan mencerminkan kelemahan dalam pemenuhan kewajiban perlindungan negara.

Selama indikator keberhasilan lebih diukur dari pencapaian distribusi dan target angka semata, sementara aspek keamanan belum menjadi prioritas yang setara, maka risiko terhadap kesehatan publik akan tetap ada. Di titik ini, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya cakupan program, tetapi oleh sejauh mana negara mampu menjamin kualitas dan keselamatan warganya secara nyata.

4.4. Tata Kelola Digital dan Keamanan Data Publik

Digitalisasi birokrasi sering dipromosikan sebagai tanda kemajuan. Banyak layanan publik dipindahkan ke aplikasi dan sistem daring dengan harapan proses menjadi lebih cepat dan transparan. Namun, percepatan ini tidak selalu diiringi kesiapan keamanan sistem. Ketika negara mendorong warga untuk menyerahkan data pribadinya ke platform digital, tanggung jawab perlindungan data menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Masalahnya terlihat dari banyaknya aplikasi layanan publik yang berdiri sendiri-sendiri tanpa integrasi yang jelas. Alih-alih memudahkan, kondisi ini justru menimbulkan kebingungan dan potensi celah keamanan. Anggaran terserap, tetapi efektivitas dan keamanan sistem belum tentu meningkat secara signifikan.

Kasus gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) akibat serangan *ransomware* pada 2024 memperlihatkan rapuhnya infrastruktur digital kita. Layanan publik sempat lumpuh dan data masyarakat berada dalam posisi rentan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pembangunan sistem digital tidak cukup hanya fokus pada tampilan layanan atau jumlah aplikasi, tetapi harus dibarengi dengan fondasi keamanan siber yang kuat. Jika dibaca menggunakan kerangka Hadiz dan Robison (2013), modernisasi institusi tidak otomatis mengubah cara kekuasaan bekerja di dalamnya. Program digitalisasi bisa saja berjalan, tetapi

tanpa pengawasan yang serius, ia berisiko hanya menjadi proyek administratif yang tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan warga.

Padahal, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi data warga. Artinya, digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal tanggung jawab. Tanpa sistem keamanan yang memadai dan kejelasan akuntabilitas ketika terjadi kebocoran, transformasi digital justru dapat menurunkan kepercayaan publik.

Akhirnya, keberhasilan reformasi birokrasi digital tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang diluncurkan, melainkan dari sejauh mana negara mampu menjamin keamanan dan integritas data masyarakat secara konsisten.

4.5. Kesimpulan: Rapor Merah Institusi Negara

Dari pembahasan di atas, terlihat bahwa persoalan birokrasi tidak berdiri sendiri-sendiri. Di sektor keamanan, hukum belum selalu berjalan secara konsisten tanpa tekanan publik. Dalam Program MBG, lemahnya pengawasan membuat risiko kesehatan anak-anak tidak bisa dianggap sepele. Sementara dalam tata kelola digital, percepatan layanan belum sepenuhnya diimbangi kesiapan perlindungan data.

Dari ketiga kasus tersebut terlihat pola yang sama: kebijakan ada, regulasi ada, target ditetapkan, tetapi pelaksanaan dan pengawasan belum selalu berjalan sejalan. Reformasi birokrasi yang dijanjikan memang sedang berlangsung, namun hasilnya belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Karena itu, tantangan terbesar bukan sekadar meluncurkan program baru atau mempercepat digitalisasi, melainkan memastikan bahwa sistem benar-benar bekerja untuk melindungi dan melayani warga secara konsisten. Di sinilah reformasi birokrasi diuji, bukan pada janji, tetapi pada praktiknya.

5. PENUTUP

5.1. Rangkuman Kegagalan: Dari Mimpi ke Tragedi

Kalau seluruh temuan dalam kajian ini kita tarik ke satu kesimpulan besar, jawabannya sederhana: ada jurang yang terlalu lebar antara janji dan kenyataan.

Asta Cita 1 berbicara tentang penguatan demokrasi, penghormatan HAM, dan negara yang melindungi rakyat. Namun dalam praktik satu tahun terakhir, ruang sipil justru menyempit. Data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menunjukkan ribuan penangkapan sewenang-wenang, praktik penyiksaan, hingga kematian di luar proses hukum. Kritik diperlakukan sebagai gangguan, bukan sebagai bagian dari demokrasi.

Di saat yang sama, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberi ruang tafsir yang rawan disalahgunakan, dan dalam banyak kasus berujung pada pembungkaman. Ancaman pidana menjadi alat kontrol yang efektif tanpa harus selalu memakai kekerasan fisik. Orang jadi takut bersuara. Mahasiswa berpikir dua kali untuk mengkritik. Masyarakat memilih diam demi merasa aman. Demokrasi perlahan berubah menjadi ruang yang dipenuhi rasa waswas.

Di sektor agraria dan lingkungan, cerita yang sama terulang. Izin investasi dipercepat, Proyek Strategis Nasional terus berjalan, tetapi pengakuan hak masyarakat adat berjalan lambat dan penuh hambatan. Konflik tanah meningkat, deforestasi meluas, dan bencana di wilayah Sumatera merenggut ribuan nyawa. Padahal hak untuk hidup telah dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketika pengawasan lingkungan diabaikan dan pembukaan lahan dibiarkan tanpa kontrol ketat, maka bencana bukan lagi sekadar peristiwa alam tapi akibat dari kelalaian kebijakan.

Pada level institusi negara, reformasi birokrasi lebih terasa sebagai slogan. Institusi keamanan masih lekat dengan pendekatan represif. Pengawasan pangan kecolongan hingga memicu insiden yang membahayakan publik. Sistem digital negara rapuh dan tidak siap menghadapi serangan siber. Alih-alih menjadi pelayan rakyat, sebagian lembaga justru lebih sibuk menjaga citra daripada membenahi akar masalah.

Semua ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan kekurangan visi, melainkan lemahnya komitmen menjalankan mandat. Negara seharusnya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga. Namun yang tampak justru pengelolaan kekuasaan yang lebih fokus pada stabilitas dan legitimasi, ketimbang keberanian melakukan pembenahan mendasar.

Karena itu, kami menyimpulkan bahwa satu tahun Kabinet Merah Putih hanyalah "Asta Cerita" sebuah dongeng pengantar tidur yang justru membiarkan rakyatnya terbangun dalam mimpi buruk. Atas dasar pengkhianatan terhadap mandat kemanusiaan (Respect, Protect, Fulfill) dan kegagalan total dalam reformasi birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, F. (2026, 5 Februari). *LBH Papua Dukung Sikap PGI Tolak PSN di Tanah Papua*. Tempo.co.
<https://www.tempo.co/hukum/lbh-papua-dukung-sikap-pgi-tolak-psn-di-tanah-papua-2112749>
- Global Forest Watch. (2026). *Indonesia Deforestation Rates & Statistics*.
<https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/>
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). *The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia*.
- Harahap, D. (2025, 5 Desember). *Ombudsman: 3.308 Laporan Masyarakat Keluhkan Layanan Kepolisian*. Media Indonesia.
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/837261/ombudsman-3308-laporan-masyarakat-keluhkan-layanan-kepolisian>
- KontraS. (2025). *Catatan Hari HAM 2025: Katastrofe Hak Asasi Manusia*.
<https://kontras.org/laporan/catatan-hari-ham-2025-katastrofe-hak-asasi-manusia>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945*.
- Muhammad, D. (2025, 25 Desember). *Update BNPB: Korban Tewas Banjir Sumatera 1.135 orang*. Beritasatu.com.
<https://www.beritasatu.com/nasional/2952629/update-bnpb-korban-tewas-banjir-sumatera-1135-orang>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Shabrina, D. (2026, Januari). *JPPI: Ada 1.242 Korban Keracunan MBG per Januari 2026*. Tempo.co.
<https://www.tempo.co/politik/jppi-ada-1-242-korban-keracunan-mbg-per-januari-2026-2106850>
- Subianto, P. (2023, 27 November). *Program Kerja: Asta Cita 1*. Prabowosubianto.com.
<https://prabowosubianto.com/program-kerja-asta-cita-1/>
- The Gecko Project. (2026). *Topic: Politics of Deforestation*.
<https://thegeckoproject.org/topics/politics-of-deforestation/>
- UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). (1999, 12 Mei). *General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11)*. UN Economic and Social Council. <https://www.refworld.org/legal/general/cescr/1999/en/87491>
- United Nations. (1948, 10 Desember). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*.
<https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>
- United Nations. (1966, 16 Desember). *International Covenant on Civil and Political Rights*.
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>